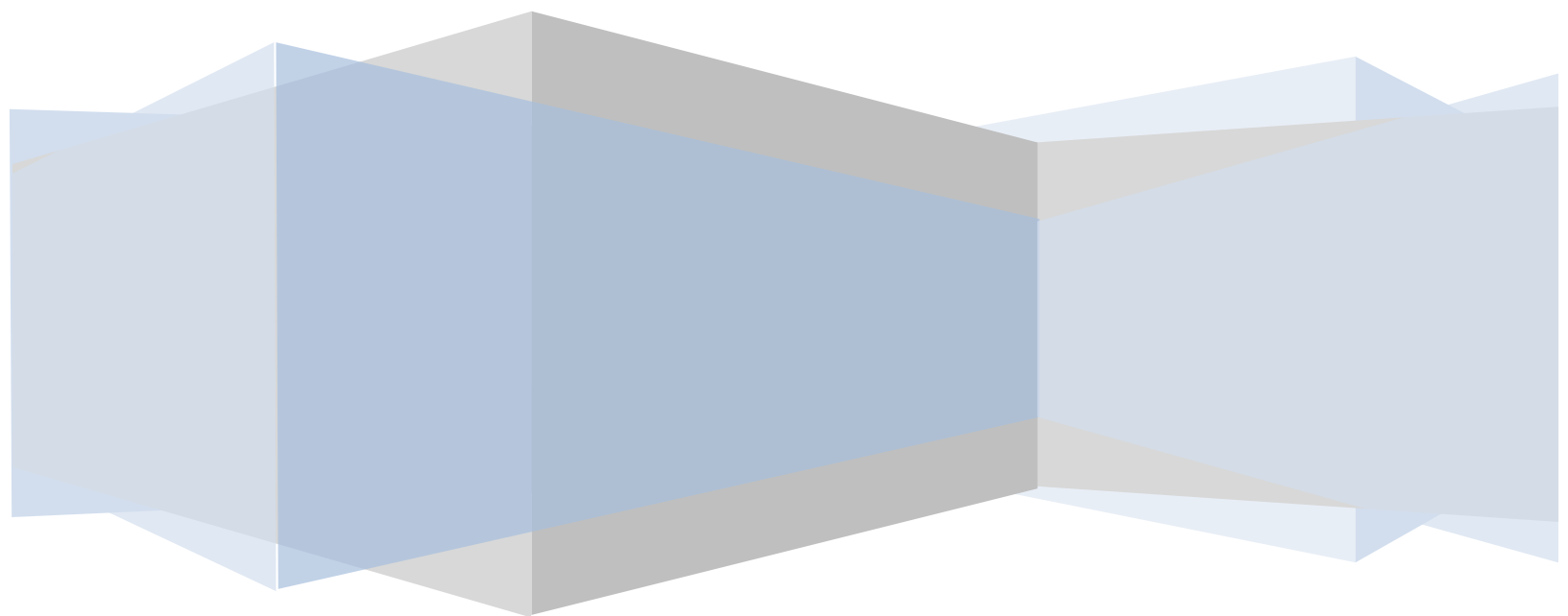




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga buku Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 disusun sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur serta program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai penjabaran lebih jauh dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023, sekaligus mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2023 sebagai upaya pemecahan berbagai masalah dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat dijadikan pedoman sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 yang akan datang serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik melalui pencapaian Visi dan Misi. Masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar penyelenggaraan program dan kegiatan Satpol PP Kab. Kotim menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Sampit, 25 Juli 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



MARJUKI, S.Pd., M.SM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670502 199203 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penyusunan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN	
 TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	
Dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong	
Praja.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong	
Praja	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	
Fungsi SKPD	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	
Masyarakat	32
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3 Program dan kegiatan	35
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	49
 BAB V PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020	8
TC-29 Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kab. Kotim	14
TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur	23
TC-31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur	26
Rumusan Rencana Program dan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kab. Kotim	39

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah ***“Melindungi segenap bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”***. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti melalui pendekatan RPJP, RPJM, Renstra SOPD, RKPD dan Renja SOPD, dengan demikian Renja SOPD merupakan salah satu landasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD yang selanjutnya menjadi acuan SOPD dalam melaksanakan dan merealisasikan program dan kegiatan pembangunan tersebut.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Perencanaan juga dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SOPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SOPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SOPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. RKPD dijadikan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim harus mendukung dalam mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SOPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SOPD) akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah;
- 6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 7) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 15) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan Pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor16);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8);

- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;
- 33) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 adalah sebagai pedoman, gambaran dan arah pembangunan dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu tahun 2023 yang berisi program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
3. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Satpol PP Kab. Kotim Tahun Anggaran 2023;
4. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satpol PP Kab. Kotim;
5. Menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran SOPD (RKA-SOPD) Tahun Anggaran 2023

1.4 Sistematika Penyusunan

Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Hasil perumusan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kajian Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu (2021) Dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat ini sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun anggaran 2020 Hal ini disebabkan oleh belum berakhirnya Pandemi Covid-19 dari tahun 2019 yang berdampak besar bagi seluruh sektor dan masyarakat pada umumnya. Aktivitas yang terbatas sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 mengakibatkan permintaan menurun. Turunnya permintaan mengakibatkan produksi juga ikut turun dan investasi melambat sehingga perekonomian termasuk di Kotawaringin Timur mengalami penurunan dan mempengaruhi pendapatan Daerah. Namun, Pada tahun 2021 penyebaran angka penularaan Covid-19 turun cukup signifikan karena sudah adanya vaksinasi bagi masyarakat. Dengan menurunnya angka penyebaran angka Covid-19 di harapkan turut serta memperbaiki perekonomian di berbagai sektor sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Terdapat beberapa program dan kegiatan pada anggaran 2021 yang mengalami rasionalisasi anggaran terkait Covid-19 sehingga pada saat perubahan anggaran 2021 tidak dianggarkan kembali dan anggaran dana di alihkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim pada Tahun 2021, pagu anggaran untuk Satpol PP Kab. Kotim sebesar Rp. 11.004.693.776,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.572.330.187,- atau terealisasi sebesar 86,98% dari pagu anggaran yang dijabarkan melalui 2 Program dan 8 Kegiatan yang terlihat dalam Tabel 2.1 Berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2021

No	Nama	Indikator Kinerja	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian
Belanja Operasi			Rp 11.004.693.776	Rp 9.572.330.187	86,98%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Rp 7.932.173.367	Rp 6.630.303.569	83,59%
Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 6.292.425.594	Rp 5.088.173.766	80,86%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	Rp 6.292.425.594	Rp 5.088.173.766	80,86%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp 123.254.000	Rp 119.344.380	96,83%
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas pada Satpol PP	Rp 65.898.000	Rp 65.500.000	99,40%
3	Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Rp 57.356.000	Rp 53.844.380	93,88%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 379.475.350	Rp 373.229.810	98,35%
4	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadadaan komponen listrik	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	100,00%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 12.613.950	Rp 12.613.950	100,00%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah pengadaan bahan bacaan	Rp 6.480.000	Rp 4.680.000	72,22%
7	Penyediaan bahan material	Jumlah Pengadaan bahan/material	Rp 50.115.400	Rp 50.115.400	100,00%
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungn tamu yang di fasilitasi	Rp 13.750.000	Rp 12.497.000	90,89%
9	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 292.516.000	Rp 289.323.460	98,91%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 811.851.659	Rp 749.161.609	92,28%
10	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terpenuhi	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	100,00%
11	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening yang dibayarkan	Rp 16.626.405	Rp 13.173.563	79,23%
12	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di pelihara	Rp 791.265.254	Rp 732.028.046	92,51%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 325.166.764	Rp 300.394.004	92,38%
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan Ops	Jumlah kendaraan yang di pelihara	Rp 308.116.764	Rp 283.344.004	91,96%
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor/bangunan lainnya	Jumlah sarana-prasarana pendukung gedung/bangun yang di pelihara/di rehabilitasi	Rp 17.050.000	Rp 17.050.000	100,00%

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Program Penigkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Rp 3.072.520.409	Rp 2.942.027.618	95,75%
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota			Rp 2.910.671.109	Rp 2.824.114.818	97,03%
15	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli dan Pengawalan	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada saat patroli,piket,pengamanan dan pengawasan lapangan	Rp 2.794.025.509	Rp 2.757.672.718	98,70%
16	Penindakan atas gangguan Kantrantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan pelaksanaan penindakan eksekusi, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	Rp -	Rp -	0,00%
17	Koordinasi Penyelenggaraan Kantrantibum serta perlinmas tingkat Kab/Kota	jumlah kegiatan pengamanan, penertiban pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, satlinmas daerah rawan bencana, pos jaga dan lokasi rencana penampungan bencana serta pelaksanaan apel siaga satlinmas dalam rangka gear pasukan Pengamanan Pilkasa/Pileg Pilpres bersama Polri	Rp 18.153.500	Rp 17.310.000	95,35%
18	Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Rp 53.192.100	Rp 46.732.100	87,86%
19	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuansa HAM	Jumlah kegiatan bagi aparat Satpol PP dan satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	Rp -	Rp -	0,00%
20	Kerjasama antar lembaga dan kemintraan dalam tehnik pencegahan dan penanganan gangguan Kantrantibum	Jumlah kegiatan bagi aparat Satpol PP dan satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	Rp 45.300.000	Rp 2.400.000	5,30%

Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota			Rp 68.445.300	Rp 54.098.200	79,04%
21	Sosialisasi Penegakkan Perda dan Perbup/Walikota	Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan	Rp 45.548.200	Rp 34.548.200	75,85%
22	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap perda dan perbup yang dilaksanakan	Rp 22.897.100	Rp 19.550.000	85,38%
23	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah aparat yang bekerjasama melalui sidang tipiring dan kegiatan lainnya yang terkait dalam menangani pelanggaran perda dan perbup	Rp -	Rp -	0,00%
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			Rp 93.404.000	Rp 63.814.600	68,32%
24	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Sosialisasi, Pendidikan Formal dan Bimtek Teknis	Rp 93.404.000	Rp 63.814.600	68,32%

A. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang di rencanakan.

Berdasarkan pada tabel 2.1 diatas, capaian realisasi keuangan pada 2 program ,8 Kegiatan dan 24 sub kegiatan selama tahun 2021 terdapat 11 (Sebelas) sub kegiatan yang capaian realisasi keuangan tidak mencapai lebih dari 90% yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian realisasi keuangan 80,86%, di karenakan Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai periode ub. Oktober sampai dengan Desember tahun 2021 dibayarkan pada tahun anggran 2022 dan dicatat sebagai utang beban dalam Laporan Keuangan Tahun 2021
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 72,22% disebabkan karena pada sistem aplikasi perencanaan untuk harga satuannya lebih besar dari harga real di lapangan.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik berupa tagihan internet, listrik, dan iair dengan capaian realisasi

keuangan sebesar 79,23%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan realisasi pembayaran secara *ad cost*.

4. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Kantritibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan capaian realisasi keuangan sebesar 0% dikarenakan mengalami rasionalisasi anggaran pada saat pergeseran anggaran dan tidak dianggarkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2021 dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan jika dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2021.
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian realisasi keuangan sebesar 87,86%. Secara fisik, sub kegiatan tersebut sudah terlaksana 100% namun secara keuangan hanya tercapai 87,86%. Hal ini dikarenakan jumlah narasumber/pembahas yang tertuang pada DPPA tahun Anggaran 2021 berbeda /lebih banyak dari jumlah narasumber/pembahas yang diajukan oleh bidang perlindungan masyarakat dan jumlah belanja/pembayaran menyesuaikan dengan *ad-cost* kebutuhan secara real yang ada dilapangan.
 - Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam tehnik pencegahan dan penanganan gangguan Kantratibum dengan capaian realisasi keuangan sebesar 5,30%. Sub Kegiatan terserbut tidak semua terlaksana dikarenakan kondisi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim yang tidak representatif untuk melaksanakan Sub Kegiatan tersebut.
5. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Perda dan Perbup/Walikota dengan capaianb realisasi keuangan sebesar 75,85%. Secara fisik, sub kegiatan tersebut sudah terlaksana 100% namun secara keuangan hanya tercapai 87,86%. Hal ini dikarenakan jumlah narasumber/pembahas yang tertuang pada DPPA Tahun anggaran 2021 berbeda/lebih banyak dari jumlah narasumber/pembahas yang diajukan oleh bidang tersebut dan jumlah

belanja/pembayaran menyesuaikan dengan *ad-cost* kebutuhan secara real yang ada di lapangan.

- Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/walikota dengan capaian realisasi keuangan sebesar 85,38%. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan menyebabkan capaian realisasi keuangan tidak dapat melebihi 90%.
- Sub kegiatan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan capaian realisasi keuangan sebesar 0% di karenakan mengalami rasionalisasi anggaran pada saat pergeseran anggaran dan tidak dianggarkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2021 dikarenakan belum selesainya Peraturan Daerah Ketertiban Umum sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan sub kegiatan tersebut.

6. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan capaian realisasi keuangan sebesar 68,32%. Secara fisik, sub kegiatan tersebut sudah terlaksana 100% namun secara keuangan hanya tercapai 68,32%. Hal ini di karenakan realisasi belanja keuangan berdasarkan *ad-cost* atau pembayaran secara real dilapangan.

B. Kegiatan yang telah memenuhi target

Adapun realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dengan capaian lebih dari 90% sebanyak 13 dari 24 sub kegiatan, diantaranya:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya dengan capaian 99,40%
- 2) Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan capaian 93,88%
- 3) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian 100%
- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian 100%
- 5) Penyediaan Bahan Material dengan capaian 100%
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan capaian 90,89%
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian 98,91%
- 8) Penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian 100%
- 9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian 92,51%

- 10) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Ops lapangan dengan capaian 91,96%
- 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
- 12) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli dan Pegawalan dengan capaian 98,70%.
- 13) Koordinasi Penyelenggaraan Kantrantibum serta Perlinmas tingkat Kab/Kota dengan capaian 95,35%

C. Kegiatan yang melebihi target

Kegiatan yang melebihi target kinerja TA 2021, sebagaimana di tetapkan dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kab. Kotawaringin Timur tahun 2021 tidak ada.

D. Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Pencapaian target untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2021 sudah baik dengan capaian realisasi keuangan sebesar 86,96% meskipun terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak mencapai lebih dari 92%. Hambatan dan kendala program serta kegiatan sehingga tidak dapat terlaksana dan tidak mencapai lebih dari 90% adalah :

- 1) Adanya rasionalisasi anggaran terkait penanganan Covid -19 yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan yang telah dianggarkan tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Keterbasan aktivitas kantor akibat pandemic Covid-19.
- 3) Adanya ketidaksinkronan pada perencanaan terkait standar biaya ada pada aplikasi dengan secara real di lapangan.
- 4) Adanya utang beban/ sub kegiatan tidak dapat di bayarkan yaitu pada subkegiatan masih adanya sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan PNS

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dari program yang sudah di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian Renstra yaitu adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana akibat pandemic Covid-19. Selain itu ketidaksinkronan pada perencanaan terkait standart biaya juga

patut di pertimbangkan kembali agar tidak timbul masalah-masalah dalam merencanakan program dan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

F. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Langkah- langkah kebijakan yang sebaiknya di ambil dalam rangka mengatasi faktor- faktor hambatan yang menyebabkan tidak berjalannya kegiatan secara maksimal adalah mengevaluasi kembali kegiatan yang sudah di programkan serta meninjau kembali pada kesinkronan data perencanaan mengenai standart biaya di lapangan. Menekankan kembali kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk tetap siaga meskipun kegiatan belum terlalu maksimal akibat Pandemi Covid-19.

Secara rinci dapat dilihat pada Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 disajikan dalam tabel TC-29:

Tabel T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Kotawaringin Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan								
1	05	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana								
1	05	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	60 Orang	88 Orang	75 Orang	70 orang	86,40	75 Orang	233 Orang	3,88
1	05	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi								
1	05	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas pada Satpol PP	0 Buah	0 stel	0 Stel	140 stel	99,01	0 Stell	140 Buah	100
1	05	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0 Kali	8 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Kali	8 Kali	100

1	05	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	3 Orang	27 Orang	3 Orang	2 Orang	98,86	12 Orang	41 Orang	13,6
1	19	02	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
1	19	02	03	02		Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (Satpol PP)		0	0 Stel	0	0	0	0	0Stel	0
1	05	02	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1	05	02	05	02		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya SDM yang memahami peraturan perundang-undangan	0	4 Orang	0	0	0	0	4 Orang	100
1	05	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi								
1	05	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik	35 Buah	15 Buah	15 Buah	1 tahun	100	15 Buah	30 Buah	0,8
1	05	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	83,28	2 Unit	4 Unit	0,4
1	05	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	40.000 Lembar/50 Buku	44.596 lembar	34.480 Lembar/30 Buku	34.480 Lembar	76,34	34.480 Lembar/30 Buku	82.556 Lembar	2,0
1	05	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pengadaan bahan bacaan	2160 Eksemplar	2.880 Eksemplar	1.080 Eksemplar	1.440 Eksemplar	50,00	1.080 Eksemplar	5.400 Eksemplar	2,5
1	05	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material	Jumlah pengadaan bahan/material	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 bidang	92,89	1 Paket	3 Paket	3
1	05	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu yang di fasilitasi	10 Kali	0	6 kali	360 kotak	93,06	6 Kali	12 Kali	1,2
1	05	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Kali	20 kali	75 kali	19 kali	89,96	75 Kali	114 kali	2,85
1	05	02	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									

1	05	02	02	09		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya penyediaan peralatan gedung kantor	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0
1	05	02	02	22		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	0	3 Gedung	0	0	0	0 Gedung	3 Gedung	100
1	05	02	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	05	02	01	17		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman yang memadai	10 kali	115 Orang	50 Orang	0 Orang	0	50 Orang	100 Orang	10
1	05	02	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	05	02	01	18		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pengamanan Ke Luar Daerah	Tersedianya anggaran untuk kegiatan rapat koordinasi, konsultasi dan pengamanan di luar daerah	0	72 Kali	0 kali	0 Kali	0	0 Kali	72 Kali	100
1	05	02	01	19		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pengamanan Ke Dalam Daerah	Tersedianya anggaran untuk kegiatan rapat koordinasi, konsultasi dan pengamanan di dalam daerah	0 kali	450 Kali	0 kali	0 Kali	0	0	450 Kali	100
1	05	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi								
1	05	01	2	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	0 Unit	0 unit	0 Unit	4 Unit	99,96	0 Unit	4 Unit	100
1	05	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	12 Unit	0 Unit	0 Unit	54 Unit	98,82	0 Unit	54 Unit	4,5
1	05	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi								
1	05	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dipenuhi	200 Surat	880 laporan	360 Surat	360 Surat	100	360 Surat	1.600 Surat	8
1	05	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	4 rekening	3 Rekening	3 Rekening	85,28	3 Rekening	10 Rekening	3,3
1	05	01	2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0 Unit	2 Unit	0 Unit	15 Unit	80,14	0 Unit	17 Unit	100
1	05	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	29 Orang	29 orang	0 Unit	15 Orang	93,83	0 Orang	44 Orang	1,5
1	05	02	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									

1	05	02	01	07		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparatur Pol PP yang melaksanakan kegiatan administrasi keuangan	0	70 Dokumen/29 Orang	29 Orang	0 Orang	0	29 Orang	58 Orang	100
1	05	02	01	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih serta insentif bagi petugas kebersihan	0	3 Gedung	0	0 Gedung	0	0 Gedung	3 Gedung	100
1	05	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi								
1	05	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	12 Unit	79,57	15 Unit	42 Unit	2,8
1	05	01	2	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana-prasarana pendukung gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	0 unit	8 Unit	3 buah	88,88	8 Unit	11 Unit	1,1
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan								
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana								
1	05	02	2	01	02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kegiatan pelaksanaan penindakan eksekusi, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0

1	05	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban, pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, satlinmas, daerah rawan bencana, pos jaga dan lokasi rencana penampungan bencana serta pelaksanaan apel siaga satlinmas dalam rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres bersama Polri	5 Kali	150 Kegiatan	5 Kali	5 Kegiatan	31,94	5 Kali	160 Kali	53,3
1	05	02	2	01	06	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan berkerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	63,79	2 Kegiatan	7Kegiatan	1,75
1	05	02	2	01	07	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Yang Berkualitas	0 Paket	0 Paket	0 Paket	1 Paket	100,00	0 Paket	1 Paket	100
1	05	02	2	01	09	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah layanan yang tersedia sebagai dampak atas penegakkan Perda dan Perkada	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0	0 Tahun	0 Tahun	0
1	05	02	2	02		Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase pelaksanaan penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota								
1	05	02	2	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	10 Kali	2 Kegiatan	98,67	10 Kegiatan	12 Kegiatan	6
1	05	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap perda dan perbup yang dilaksanakan	6 Kali	15 Kegiatan	6 Kali	6 Kegiatan	53,22	6 Kali	27 Kali	4,5

1	05	02	2	02	03	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah aparaturnya yang berkerjasama melalui sidang Tipiring dan kegiatan lainnya yang terkait dalam menangani pelanggaran perda dan perbup	17 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Kasus	0 Orang	0
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan								
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana								
1	05	02	2	01	04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang diberdayakan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat baik berupa penyuluhan, honorarium dan sarana, prasarana dan kelengkapan penunjang	2 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,5
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan								
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana								
1	05	02	2	01	01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada saat patroli, piket, pengamanan dan pengawasan lapangan	275 Orang	95 Orang	118 Orang	0 Orang	0	118 Orang	213 Orang	0,7
1	05	02	2	01	05	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan bagi Aparat Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0
1	05	02	2	01	07	Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol PP	Jumlah aparat Satpol PP yang menduduki jabatan fungsional	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0

1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan								
1	05	02	2	03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina								
1	05	02	2	03	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Sosialisasi,Pendidikan Formal dan Bimtek Teknis	2 Orang	0 Orang	1 Orang	0 Orang	0	1 Orang	1 Orang	1
1	05	02	26			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah keamanan dan kenyamanan lingkungan yang meningkat keamanannya								
						Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan		0	0 Orang	0 Orang	0 orang	0	0	0	0
						Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan		0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0	0
						Kegiatan Pendataan dan pelaporan (Pendataan anggota Satlinmas dalam rangka pembuatan database kabupaten)		0	0	0	0	0	0	0	0
						Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0
						Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0	0
1	05	02	16			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal									
						Kegiatan Peningkatan Kerjasama dgn Aparat Keamanan & Teknik Pencegahan Kejahatan	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali	0	0 Kali	0 Kali	2 Kali	100	0	0	0
						Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	Jumlah aparat yang mengendalikan keamanan dalam rangka pengamanan pemilu/pilkada	0	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0	0	0
						Kegiatan Pengendalian keaman dalam rangka pengamanan pelaksana Pemilu/Pilkada	Jumlah aparat yang mengendalikan keamanan dalam rangka pengamanan pemilu/pilkada	0	0	0	0	0	0	0	0

						Kegiatan Pengamanan kegiatan pejabat pusat/daerah	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan pengamanan kegiatan pejabat pusat dan daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kegiatan Peningkatan kerjasama dalam menegakan Perda Tipiring Aparat Satpol-PP dg TNI/POLRI dan Kejaksaan	Terlaksananya Penegakan Perda	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kegiatan Peningkatan kerjasama dalam menegakan Perda eksekusi Aparat Satpol-PP dg TNI/POLRI dan Kejaksaan	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali	0	0 Kali	1 Kali	0 Kali	0	0	0	0
						Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pengawasan Lapangan	Terwujudnya Patroli untuk memelihara keamanan dan Ketertiban Umum	0	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0	0	0
						Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		0		0 Kali	0 Kali	0	0	0	0
1	05	02	19			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan									
						Kegiatan Apel Siaga Satlinmas Dalam Rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pileg dan Pilpres Bersama Polri		0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0	0
1	05	02	21			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat									
1	05	02	21	02		Kegiatan Penyuluhan Kepada Pelaku Usaha		0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0	0
						Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba		0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0	0
						Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	02	21			Program Pendidikan Politik Masyarakat									
						Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat		0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selama melaksanakan Renstra 2021-2026 berusaha melaksanakan semua fungsi yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur semaksimal mungkin, terutama mengadakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan Daerah/ Peraturan Bupati yang harus di ketahui, di mengerti, dan di laksanakan, supaya pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan lancar.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan hal yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, tentram dan teratur dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan penunjang pembangunan daerah merupakan ketentuan dasar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Itu sendiri. Dalam meyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus diikuti dengan menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik dari kuantitas maupun kualitas di Kabupaten Kotawaringin terus berkembang dan meningkat. Untuk mengatur semua ini maka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wajib dilaksanakan.

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah 16.496 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 436.079 jiwa, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 132 (seratus tiga puluh dua) desa dan 12 (dua belas) kelurahan. Dengan penduduk yang heterogen sangat rawan atas timbulnya gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan visi “***Terwujudnya pelayanan penegakan PERDA dan PERKADA, ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat yang professional di Kabupaten Kotawaringin Timur.***”

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja, sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C 30 di bawah ini.

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penegakkan PERDA dan PERKADA			92%	93%	93%	94%	100%	94,08%	93%	94%	
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat			27	27	27	27	30	31	27	27	
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)			92%	94%	95%	96%	100%	94,08%	95%	96%	
5	Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim			2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	5 Orang	7 Orang	2 Orang	2 Orang	
6	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil/pelayanan pengobatan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada			1 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	-	-	5 Orang	5 Orang	
11	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP			B	B	B	B	B	B	B	B	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada tabel dibawah ini menerangkan beberapa hambatan-hambatan hingga rekomendasi kebijakan yang akan di ambil oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim demi meningkatnya kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotawaringin Timur.

No	Permasalahan dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Tupoksi SKPD	Dampak Terhadap Pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah	Tantangan dan Peluang	Rekomendasi atau Catatan Strategis
1	Masih Minimnya Kendaraan Operasional Untuk pelaksanaan kegiatan lapangan	Belum optimalnya Pemeliharaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda/Perkada	Pemeliharaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda/Perkada dapat terlaksana lebih optimal	Pengadaan Kendaraan operasional
2	Minimnya kompetensi SDM yang memiliki keahlian khusus yaitu PPNS dalam upaya penegakkan Perda/Perkada	Belum optimalnya Penanganan penegakkan Perda/Perkada	Peningkatan kompetensi SDM yang memiliki keahlian khusus yaitu PPNS mampu meningkatkan profesionalisme dalam penanganan penegakkan Perda/Perkada	Pelaksanaan Diklat PPNS
3	Sarana dan prasarana kantor yang kurang representatif	Belum optimalnya pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda/Perkada	Peningkatan sarana dan prasarana dapat membuat tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda/Perkada menjadi lebih optimal	Pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	Minimnya peran aktif dan kompetensi SDM Satlinmas sebagai bagian Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat	Belum optimalnya kondisi lingkungan masyarakat yang aman terkait adanya gangguan kamtibmas	Meningkatnya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan terkendali	Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan bagi satlinmas serta koordinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan terkait peran aktif satlinmas
5	Belum terpenuhinya rasio Polisi PP dengan luas wilayah dan jumlah penduduk	Belum optimalnya Pemeliharaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda/Perkada	Pemeliharaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda/Perkada dapat terlaksana lebih optimal	Penambahan jumlah anggota Satpol PP seusai dengan ketentuan peraturan yang ada

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD

Kabupaten Kotawaringin Timur. Perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 53 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur, Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun Pusat.

Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD tahun 2023 dengan Hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 tertuang pada tabel T-C 31 berikut ini :

Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Kotawaringin Timur

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kab. Kotim	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan		7.547.043.820	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kab. Kotim	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan		7.560.912.730	
1	05	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	80%	6.199.788.668	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana		6.294.116.244	
1	05	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	75 Orang/bulan	6.199.788.668	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	60 Orang	6.294.116.244	
1	05	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		47.816.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		219.944.000	
1	05	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan pakaian dinas pada Satpol PP	0 paket	0	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan pakaian dinas pada Satpol PP	150 Stel	150.000.000	
1	05	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kotim	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0 Orang	0	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kotim	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	25.528.000	
1	05	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	4 Orang	47.816.000	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	4 Orang	44.416.000	
1	05	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	80%	341.960.700	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		239.768.500	

1	05	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan komponen listrik	1 Paket	8.250.000	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan komponen listrik	35 Buah	3.000.000	
1	05	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 Paket	0	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	23.473.900	
1	05	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	29.960.000	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	40.000 Lembar/50 Eksemplar	14.500.000	
1	05	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan bahan bacaan	1.440 Dokumen	12.960.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan bahan bacaan	1.800 Eksemplar	10.800.000	
1	05	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan bahan/material	1 Paket	30.890.700	Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan bahan/material	1 Paket	46.820.600	
1	05	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Kotim	Jumlah kunjungan tamu yang di fasilitasi	12 Laporan	15.600.000	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Kotim	Jumlah kunjungan tamu yang di fasilitasi	10 Kali	12.750.000	
1	05	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kotim	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Laporan	244.300.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kotim	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Kali	128.424.000	
1	05	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotim	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	80%	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotim	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi		11.623.000	
1	05	01	2	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	0 Unit	0	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	0 Unit	0	
1	05	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan mebel	0 Unit	0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan mebel	10 Unit	11.623.000	
1	05	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotim	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	80%	669.590.440	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotim	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		535.291.038	
1	05	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	Jumlah surat yang dipenuhi	360 Laporan	3.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	Jumlah surat yang dipenuhi	200 Surat	2.400.000	
1	05	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim	Jumlah rekening yang dibayar	4 Laporan	101.163.720	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	43.189.260	

1	05	01	2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kotim	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0 Unit	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kotim	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0 Unit	0	
1	05	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kab. Kotim	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	26 Laporan	564.826.720	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kab. Kotim	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	29 Orang	489.701.778	
1	05	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotim	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	80%	287.888.012	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotim	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi		260.169.948	
1	05	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kotim	Jumlah kendaraan yang dipelihara	21 Unit	244.708.012	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kotim	Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 Unit	229.719.948	
1	05	01	2	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kotim	Jumlah sarana-prasarana pendukung gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	12.180.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kotim	Jumlah sarana-prasarana pendukung gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	30.450.000	
1	05	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kotim	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	31.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kotim	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	0	
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		156.323.400	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		166.073.900	
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana		67.187.300	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana		69.723.900	
1	05	02	2	01	02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan pelaksanaan penindakan eksekusi, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada	0 Kegiatan	0	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan pelaksanaan penindakan eksekusi, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada	1 Kegiatan	19.050.000	

1	05	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban, pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, satlinmas, daerah rawan bencana, pos jaga dan lokasi rencana penampungan bencana serta pelaksanaan apel siaga satlinmas dalam rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres bersama Polri	1 Dokumen	16.527.500	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban, pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, satlinmas, daerah rawan bencana, pos jaga dan lokasi rencana penampungan bencana serta pelaksanaan apel siaga satlinmas dalam rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres bersama Polri	5 Kali	31.190.000	
1	05	02	2	01	06	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan berkerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	4 dokumen	50.659.800	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan berkerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	2 Kegiatan	19.483.900	
1	05	02	2	01	07	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Yang Berkualitas	0 Paket	0	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Yang Berkualitas	0 Paket	0	
1	05	02	2	01	09	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakkan Perda dan Perkada	Kab. Kotim	Jumlah layanan yang tersedia sebagai dampak atas penegakkan Perda dan Perkada	0 tahun	0	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakkan Perda dan Perkada	Kab. Kotim	Jumlah layanan yang tersedia sebagai dampak atas penegakkan Perda dan Perkada	0 tahun	0	
1	05	02	2	02		Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Persentase pelaksanaan penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	80%	89.136.100	Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Persentase pelaksanaan penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		96.350.000	

1	05	02	2	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan	1 Laporan	61.416.100	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan	2 kegiatan	52.900.000	
1	05	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Jumlah pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap perda dan perbup yang dilaksanakan	16 Laporan	27.720.000	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Jumlah pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap perda dan perbup yang dilaksanakan	10 Kali	24.920.000	
1	05	02	2	02	03	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Jumlah aparaturnya yang berkerjasama melalui sidang Tipiring dan kegiatan lainnya yang terkait dalam menangani pelanggaran perda dan perbup	0 Orang	0	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Jumlah aparaturnya yang berkerjasama melalui sidang Tipiring dan kegiatan lainnya yang terkait dalam menangani pelanggaran perda dan perbup	17 Orang	18.530.000	
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		0	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		700.000.000	
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana		0	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana		700.000.000	
1	05	02	2	01	04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kotim	Jumlah Satlinmas yang diberdayakan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat baik berupa penyuluhan, honorarium dan sarana, prasarana dan kelengkapan penunjang	0 Kegiatan	0	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kotim	Jumlah Satlinmas yang diberdayakan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat baik berupa penyuluhan, honorarium dan sarana, prasarana dan kelengkapan penunjang	1.400 orang satlinmas	700.000.000	
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	80%	1.408.881.330	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		3.184.637.920	

1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana		1.408.881.330	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana		3.184.637.920	
1	05	02	2	01	01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kab. Kotim	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada saat patroli, piket, pengamanan dan pengawasan lapangan	250 Kasus	1.408.881.330	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kab. Kotim	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada saat patroli, piket, pengamanan dan pengawasan lapangan	275 Orang	1.384.637.920	
1	05	02	2	01	05	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan bagi Aparat Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	0 Kegiatan	0	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan bagi Aparat Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	4 Kegiatan	1.800.000.000	
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		0	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		50.624.000	
1	05	02	2	03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase Pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina		0	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase Pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina		50.624.000	
1	05	02	2	03	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Kotim	Jumlah PPNS yang mengikuti Sosialisasi, Pendidikan Formal dan Bimtek Teknis	0	0	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Kotim	Jumlah PPNS yang mengikuti Sosialisasi, Pendidikan Formal dan Bimtek Teknis	1 Orang	50.624.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Secara komprehensif, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim bertugas dan berperan dalam menegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta melakukan pembinaan di bidang perlindungan masyarakat sehingga secara detail usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat melalui musrenbang mengarah pada upaya peningkatan keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Dalam musrenbang Kab. Kotim untuk tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
---------	-------------------------------------

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya menangani dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui **Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 no. 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur no. 235) yang kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang di berikan Kabupaten di bidang penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan unsur penunjang pemerintah Daerah yang di pimpin oleh Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin timur,

Visi :

Terwujudnya pelayanan penegakan PERDA dan PERKADA Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat yang profesional di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Misi :

1. Menegakkan PERDA dan PERKADA secara profesional, obyektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat.
2. Menjaga ketertiban umum dan ketentraman.
3. Memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulan bencana, keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam penyelenggraan PEMILU serta upaya pertahanan NEGARA.

4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD/Instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan dalam melaksanakan tugas.
5. Menyiapkan sarana/prasarana yang memenuhi standar dalam mendukung pelaksanaan tugas .

3.2. **Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur merumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis penjabaran dari misi Bupati yaitu **Misi 2 : mewujudkan Sumberdaya manusia yang berkualitas, Berdaya Saing, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan misi 4 : mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Berwibawa (Good Governance)** yang ingin di capai atau di hasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan misi tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan Masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas Kinerja Birokrasi.

Dalam rangka untuk menindaklanjuti Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu ditentukan Sasaran yang akan dicapai agar lebih terukur. Penetapan Sasaran ini di perlukan untuk memberikan focus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu selama lima tahun kedepan. Adapun sasaran dan indikator sasaran yang di tetapkan yaitu;

1. Meningkatnya jumlah masyarakat/ badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - ❖ Persentase penegakkan PERDA dan PERKADA
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - ❖ Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS)
3. Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib
 - ❖ Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

4. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada

- ❖ Jumlah PPNS Satpol PP di Kab.Kotawaringin Timur

5. Meningkatnya Kapasitas akuntabilitas birokrasi

- ❖ Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP

3.3. Program dan Kegiatan

A. Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program Dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai OPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang – undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang di rencanakan pada tahun 2023 didasarkan pada pertimbangan dari berbagai faktor-faktor, diantaranya tugas pokok dan fungsi, tujuan, dan sasaran dari isu-isu strategis serta gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023 yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

- a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material
 - Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor atau bangunan lainnya.

2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
 - Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
 - Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Saran dan Prasana Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakkan Perda dan Perkada.
- b) Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- c) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2023 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan 2 (dua) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program – program tersebut di atas, dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2023 berjumlah 2 (dua) Program 7 (Tujuh) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan yang menurut sifat penyebarannya sesuai dengan fokus pelaksanaan kegiatan.

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan fokus penyebarannya, maka anggaran yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar

Rp. 9.112.248.550 (*Sembilan Miliar Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).

C. Rumusan Program dan Kegiatan sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023.

D. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan uraian indikator output kegiatan, pagu anggaran, lokasi, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 dijelaskan pada Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024															
Kabupaten Kotawaringin Timur															
SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KOTIM															
Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1							Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	05						Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				9.112.248.550				11.662.248.550
1	05	01					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan	Kab. Kotim	80%	7.547.043.820			80%	7.775.191.820
1	05	01	2	02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	Kab. Kotim	80%	6.199.788.668			80%	6.406.747.168
1	05	01	2	02	01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kotim	75 Orang/bulan	6.199.788.668	APBD Kab. Kotim		75 Orang/bulan	6.406.747.168
1	05	01	2	05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Kotim	80%	47.816.000			80%	47.816.000
1	05	01	2	05	02		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kotim	0 paket	0	APBD Kab. Kotim		0 paket	0
	05	01	2	05	09		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	sesuai undangan/Nota dinas/Telaahan staf	0 Orang	0	APBD Kab. Kotim		0 Orang	0
1	05	01	2	05	11		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	sesuai undangan/Nota dinas/Telaahan staf	4 Orang	47.816.000	APBD Kab. Kotim		4 Orang	47.816.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

1	05	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Kotim	80%	341.960.700			80%	347.160.700
1	05	01	2	06	01	Sub Kegiatan Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Kotim	1 Paket	8.250.000	APBD Kab. Kotim		1 Paket	8.250.000
1	05	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Kotim	1 Paket	29.960.000	APBD Kab. Kotim		1 Paket	29.960.000
1	05	01	2	06	06	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Kotim	1.440 Dokumen	12.960.000	APBD Kab. Kotim		1.440 Dokumen	12.960.000
1	05	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Kotim	1 Paket	30.890.700	APBD Kab. Kotim		1 Paket	30.890.700
1	05	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kab. Kotim	12 Laporan	15.600.000	APBD Kab. Kotim		16 Laporan	20.800.000
1	05	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	sesuai undangan/Nota dinas/Telaahan staf	15 Laporan	244.300.000	APBD Kab. Kotim		15 Laporan	244.300.000
1	05	01	2	06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Kotim	0 Paket	0	APBD Kab. Kotim		0 Paket	0
1	05	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Kotim	0 paket	0	APBD Kab. Kotim		0 paket	0

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

1	05	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Kotim	80%	669.590.440			80%	671.739.940
1	05	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Kotim	360 Laporan	3.600.000	APBD Kab. Kotim		360 Laporan	3.600.000
1	05	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Kotim	4 Laporan	101.163.720	APBD Kab. Kotim		4 Laporan	101.163.720
1	05	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Kotim	26 Laporan	564.826.720	APBD Kab. Kotim		26 Laporan	566.976.220
1	05	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	Kab. Kotim	80%	287.888.012			80%	301.728.012
1	05	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Kotim	21 Unit	244.708.012	APBD Kab. Kotim		21 Unit	244.708.012
1	05	01	2	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Kotim	15 Unit	12.180.000	APBD Kab. Kotim		15 Unit	18.270.000
1	05	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Kotim	3 Unit	31.000.000	APBD Kab. Kotim		3 Unit	38.750.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

1	05	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	Kab. Kotim	80%	0			80%	0
1	05	01	2	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab. Kotim	0 Unit	0	APBD Kab. Kotim		0 Unit	0
1	05	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Meubel	Jumlah meubel yang disediakan	Kab. Kotim	0 Unit	0	APBD Kab. Kotim		0 Unit	0
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	Kab. Kotim	80%	1.565.204.730			80%	3.887.056.730
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana	Kab. Kotim	80%	1.476.068.630			80%	3.697.242.630
1	05	02	2	01	01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	Kab. Kotim	250 Kasus	1.408.881.330	APBD Kab. Kotim		250 Kasus	2.119.155.330

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

1	05	02	2	01	02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kab. Kotim	0 Kasus	0	APBD Kab. Kotim	0 Kasus	57.000.000
1	05	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	10 Dokumen	16.527.500	APBD Kab. Kotim	20 Dokumen	70.427.500
1	05	02	2	01	04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Kotim	0 Dokumen	0	APBD Kab. Kotim	2 Dokumen	1.400.000.000
1	05	02	2	01	05	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Kotim	0 Orang	0	APBD Kab. Kotim	0 Orang	0
1	05	02	2	01	08	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Kab. Kotim	0 Dokumen	0	APBD Kab. Kotim	0 Dokumen	0
1	05	02	2	01	07	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kab. Kotim	4 Dokumen	50.659.800	APBD Kab. Kotim	4 Dokumen	50.659.800

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

1	05	02	2	01	08	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	Kab. Kotim	0 Unit	0	APBD Kab. Kotim	0 Unit	0
1	05	02	2	01	09	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakkan perda dan perkada yang terlayani	Kab. Kotim	0 Laporan	0	APBD Kab. Kotim	0 Laporan	0
1	05	02	2	02		Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase pelaksanaan penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	80%	89.136.100		80%	89.086.100
1	05	02	2	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	Kab. Kotim	1 Laporan	61.416.100	APBD Kab. Kotim	1 Laporan	61.366.100
1	05	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab. Kotim	16 Laporan	27.720.000	APBD Kab. Kotim	16 Laporan	27.720.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

1	05	02	2	02	03	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota sesuai SOP	Kab. Kotim	0 Laporan	0	APBD Kab. Kotim	0 Laporan	0
1	05	02	2	03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	Kab. Kotim	80%	0		80%	100.728.000
1	05	02	2	03	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	sesuai undangan/Nota dinas/Telaahan staf	0 Laporan	0	APBD Kab. Kotim	2 Laporan	100.728.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan dari hasil mapping permendagri nomor 90 tahun 2019. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan khususnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sesuai lingkup kerja Satpol PP Kab. Kotawaringin Timur. Keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Berkeadilan dan Berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 terdapat 2 Program, 9 kegiatan dan 33 sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rencana Kerja dan Pendanaan Program mengemukan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SOPD dan mengacu kepada RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki rencana kerja tahun 2023 dengan total pagu sebesar Rp. **9.112.248.550**

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaannya, penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun anggaran 2023 yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) maka perlu dijabarkan dan diimplementasikan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Sosialisasi Renstra dan Renja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak guna melaksanakan Renstra dan Renja yang telah di sepakati;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder terkait dan relevan secara disiplin tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pencapaian tujuan akhir pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.

5. Pengevaluasian dan pengkajian hasil pengukuran pencapaian tujuan akhir sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan untuk mencapai tujuan akhir yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, Sejahtera.***

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Rencana Kerja satu tahunan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan. Sasaran Strategis Renja Satuan Polisi Pamong Praja diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta dilaksanakan oleh seluruh Bidang sesuai dengan lingkup tugas fungsi masing-masing.

Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal yang bersifat *force majeure*.

a. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
2. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan melekat oleh masing-masing bidang dan sekretariat;
3. Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja pada Bagian Organisasi.

b. Rencana Tindak Lanjut

Koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi sejenis ditingkat Kabupaten/Kota serta kerjasama dengan pihak pusat dengan instansi

vertikal sangat mutlak agar di dapat pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat.

Harapan kami di tahun 2023 kondisi sosial, ekonomi, politik dan kebijakan pemerintah, (baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi) tidak berbeda jauh dengan kondisi yang sudah kita proyeksikan dalam penyusunan perencanaan ini, sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ini dapat tercapai secara optimal.